

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya dapat dijadikan dasar atau acuan dalam sebuah penelitian sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti merupakan salah satu data pendukung yang digunakan, berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan diantaranya adalah:

- 1) Penelitian Domri, Ridwan, Mulia Jaya (2019) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Bungo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana PKH membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin.

- 2) Penelitian Supratman, J.S (2019) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di kelurahan belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan belum bisa dikatakan efektif, Kn tetapi pada tahapan pencapaian tujuan pelaksanaan PKH di Kelurahan Belawan ini sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan PKH di Kecamatan Kelurahan Belawan II.

3) Penelitian Muh Ainung Nur (2016) dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan bidang Pendidikan di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan tipe penelitian adalah penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bidang Pendidikan di Desa Panciro secara umum sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Penelitian terdahulu		Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan	
	Nama/tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Domri, Ridwan, Mulia Jaya/ 2019	Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	- Variable penelitiannya yaitu efektivitas PKH	- Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif - Lokasi penelitian yaitu Desa Pulau Lebar
2.	Supratman, J.S/ 2019	Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan Kota Medan	- Variabel penelitiannya yaitu efektivitas PKH	- Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif - Lokasi penelitian yaitu kelurahan belawan
3.	Muh. Ainung Nur/2016	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	- Variabel penelitiannya yaitu efektivitas PKH	- Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif - Lokasi penelitian yaitu Desa Panciro

Sumber: Domri, Supratman dan Muh. Ainung.

Berbeda dengan penelitian ini, tiga penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kuantitatif dengan unit analisis Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH komponen pendidikan. Kebaruan penelitian ini dibandingkan ketiga penelitian terdahulu yaitu penelitian ini lebih berfokus pada keberlanjutan pendidikan anak KPM dalam menempuh pendidikan.

Keunggulan penelitian ini dibandingkan dengan ketiga penelitian terdahulu adalah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga jangkauan ke populasi lebih luas dibandingkan penelitian kualitatif serta data yang diperoleh dapat mewakili seluruh populasi.

## **2.2 Tinjauan Konsep tentang Efektivitas**

### **2.2.1 Pengertian Efektivitas**

Pengertian Efektivitas menurut Mardiasmo (2017:134) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Sedangkan menurut Campbell dalam Mutiarin (2014:97) “efektivitas dapat diartikan juga sebagai tingkat kemampuan suatu Lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.

Efektivitas menurut pendapat Subagyo dalam Budiani (2007) adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ahli lain berpendapat bahwa efektivitas tidak hanya dipandang dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam mencapai tujuan, tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, tepat waktunya dengan

menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan (Siagian, 2002).

Penilaian terhadap efektivitas berupa pernyataan berdasarkan fakta tentang seberapa banyak tujuan program dapat dicapai, seberapa besar komponen-komponen program telah berfungsi dalam pencapaian tujuan. Program atau usaha dikatakan efektif apabila suatu usaha mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian efektivitas di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas sebagai tingkat keberhasilan mencapai tujuan dengan ketepatan waktu dan dengan menggunakan sumber-sumber dalam melakukan kegiatan. Dengan kata lain, efektivitas program merupakan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya.

### 2.2.2 Aspek-aspek Efektivitas

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13) efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi, yaitu Lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif

3. Aspek ketentuan dan peraturan, efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatan.
4. Aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi program tersebut dapat dicapai.

Aspek Efektivitas Menurut Subagyo dalam Budiani (2007:53) terdapat aspek-aspek untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Suatu program dikatakan efektif apabila sasaran sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelum program dijalankan.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai program dapat tersampaikan kepada masyarakat dan khususnya tersampaikan kepada sasaran program.
3. Pencapaian tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan program merupakan target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada program. Monitoring atau pemantauan dilakukan agar pelaksanaan program dapat sesuai dengan aturan yang sebelumnya telah ditentukan.

Berdasarkan aspek-aspek efektivitas diatas peneliti menyimpulkan bahwa efektif atau tidaknya suatu program dapat dilihat dari sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, informasi mengenai program tersampaikan pada peserta program, kesesuaian antara hasil dan tujuan program yang telah ditetapkan, dan kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan program.

## **2.3 Tinjauan konsep tentang Program Keluarga Harapan**

### **2.3.1 Pengertian Program Keluarga Harapan**

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PHK (2021), Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga kurang mampu yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki komponen sebagai persyaratan yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Mekanisme Program Keluarga Harapan ini dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen KPM PKH, pemutakhiran data KPM PKH dan transformasi kepesertaan PKH

### **2.3.2 Tujuan Program Keluarga Harapan**

Program Keluarga Harapan atau PKH memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk jasa keuangan formal kepada KPM.

PKH bertujuan untuk membuka akses keluarga miskin untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku KPM dalam mengakses fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

#### 2.3.3 Sasaran

Sasaran PKH merupakan keluarga yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

#### 2.3.4 Kriteria Penerima Manfaat PKH

Penerima manfaat PKH dapat dibedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki kriteria dengan rincian sebagai berikut:



## 1. Komponen Kesehatan

### 1) Ibu Hamil/nifas/menyusui

Ibu Hamil/nifas/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.

### 2) Anak Usia Dini

Anak Usia Dini adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

## 2. Komponen Pendidikan

Kriteria penerima PKH komponen Pendidikan yakni anak usia sekolah. Anak usia sekolah yang dimaksud adalah seorang anak dengan usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar, yang menempuh tingkat Pendidikan SD/MI sederajat atau SMP/Mi sederajat, dan/atau SMA/MA sederajat.

## 3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Kriteria penerima PKH komponen kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

### 1) Lanjut Usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

### 2) Penyandang Disabilitas berat

Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan

atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

#### 2.3.5 Mekanisme penyaluran PKH

1. Pembuatan rekening penerima bantuan.
2. Sosialisasi dan edukasi.
3. Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
4. Proses penyaluran bantuan sosial.
5. Penarikan dana bantuan sosial.
6. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan.
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial

#### 2.3.6 Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat PKH berdasarkan Pedoman Pelaksana PKH (2021) yaitu:

##### 1. Hak KPM PKH

KPM PKH berhak mendapatkan:

- 1) Bantuan sosial PKH
- 2) Pendampingan sosial PKH
- 3) Pelayanan di fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;  
dan
- 4) Program bantuan komplementer di bidang Kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

##### 2. Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

- 1) Komponen Kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan.
- 2) Komponen Pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85%.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- 4) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.
- 5) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar.
- 6) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.

### 2.3.7 Sanksi-sanksi

#### 1. Bagi peserta PKH

Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

- 1) Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahap penyaluran bantuan.

- 2) Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/ atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
  - 3) Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
  - 4) Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
  - 5) Jika dalam tiga kali siklus penyaluran berturut-turut atau selama sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
  - 6) KM terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
  - 7) Peserta yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta PKH.
2. Bagi pendamping PKH

Bagi pendamping yang KM didampinginya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa:

- 1) Teguran secara lisan maupun tertulis.
- 2) Penundaan pembayaran honorarium.
- 3) Penghentian kontrak kerja

## **2.4 Tinjauan konsep tentang Pendidikan**

### **2.4.1 Pengertian Pendidikan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara dan pembuatan mendidik. Pengertian Pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak bangsa dan negara.

Menurut John Dewey dalam Sudarto (2019) “pendidikan adalah sebuah proses pengalaman. Baginya, pendidikan membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi usia. Sebab, proses pertumbuhan meliputi penyesuaian pada tiap fase kecakapan seseorang”. Sedangkan menurut Lavengeld dalam syafiril (2017) “Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaan dalam perkembangannya”. Langeveld menjelaskan bahwa pendidikan itu ditujukan untuk membentuk karakter anak agar cakap dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya sendiri.

#### 2.4.2 Jalur Pendidikan

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas:

##### 1. Pendidikan formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

##### 2. Pendidikan nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

##### 3. Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

#### 2.4.3 Jenjang Pendidikan Formal

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan formal terdiri atas:

### 1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Pasal 13). Pendidikan dasar merupakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

### 2. Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat.

### 3. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma: Sarjana, Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau

profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, menciptakan pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

## **2.5 Tinjauan konsep tentang Pekerjaan Sosial**

### **2.5.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Menurut Siporin dalam Fahrudin (2018:39) menyebutkan bahwa “Pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah – masalah sosial mereka, untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka”. Sedangkan menurut *National Association of Social Workers* (NASW) dalam Fahrudin (2018: 39) merumuskan pekerjaan sosial sebagai berikut:

“Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan – tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai – nilai, prinsip – prinsip, dan teknik – teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan – tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan – pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu – individu, keluarga – keluarga, dan kelompok – kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan – pelayanan sosial dan kesehatan; dan ikut serta dalam proses – proses legislatif yang berkaitan. Praktik pekerjaan sosial memerlukan pengetahuan tentang perkembangan dan perilaku manusia; tentang institusi – institusi sosial, ekonomi, dan kultural; dan tentang interaksi antara semua faktor ini. “

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan profesional yang memberikan pertolongan kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam memecahkan masalah mereka dan meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial mereka.



### 2.5.2 Tujuan pekerjaan sosial

Zastrow dalam Fahrudin (2012:67) menyebutkan bahwa tujuan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan – kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem – sistem yang memberikan kepada mereka sumber – sumber, pelayanan – pelayanan, dan kesempatan – kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem yang menyediakan orang dengan sumber – sumber, dan pelayanan – pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari pekerjaan sosial yaitu membantu meningkatkan dan memperbaiki keberfungsian sosial individu, kelompok, maupun masyarakat.

### 2.5.3 Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS). Kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Pekerjaan sosial memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan karena sejak lahirnya pekerjaan sosial tidak pernah terlepas dari upaya mengatasi kemiskinan

(Ishartono dalam Poulakan 2017). Pekerjaan sosial serta pekerja sosial memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pengentasan kemiskinan. Pekerjaan sosial sebagai suatu disiplin ilmu dan profesi tidak hanya memandang kemiskinan sebagai persoalan yang harus diatasi tapi juga memperhitungkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat miskin untuk dapat ikut berusaha keluar dalam lingkaran kemiskinan.

Pekerjaan sosial sebagai profesi utama dalam usaha kesejahteraan sosial memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah kemiskinan. Tugas dan tanggung jawab pekerjaan sosial adalah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, agar mereka dapat berfungsi sosial atau dapat menjalankan tugas-tugas kehidupannya dengan baik, yakni tugas dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Selain itu, pekerjaan sosial juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi-situasi sosial yang kondusif bagi kehidupan mereka.

Situasi-situasi sosial yang dimaksud adalah terciptanya peluang dan kesempatan usaha, terbukanya akses dan jaringan usaha/kerja, adanya jaminan usaha dan informasi pasar. Dalam konteks ini, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani masalah kemiskinan tidak hanya diarahkan kepada si klien (masyarakat miskin), tetapi juga ditujukan kepada situasi-situasi sosial yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal tersebut didasari oleh pendekatan pekerjaan sosial yang senantiasa berorientasi pada sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya (person-in-enviranment dan person-insituation).

Keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerja sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan juga pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) masyarakat miskin yang dibantu.

#### 2.5.4 Metode dan Teknik Pekerjaan Sosial

Pekerja Sosial dalam melakukan pelayanan pertolongan memiliki metode dan teknik yang digunakan. Metode dan teknik tersebut yaitu:

##### 1. Metode

Fahrudin (2014: 71) menyebutkan bahwa praktik pekerjaan sosial memiliki tiga metode, yaitu *Social Casework*, *Social Groupwork* dan *Community Development/Community Organization*. *Community Development/Community Organization* juga dikenal dengan *Community Work*, intervensi komunitas, dan ada pula intervensi makro yang pada hakikatnya mengacu pada hal yang sama. Konteks pekerjaan sosial di dalam sebuah komunitas (masyarakat, kebijakan dan organisasi) menggunakan metode intervensi komunitas/*Community Work*.

Menurut Netting (2004) intervensi makro merupakan bentuk intervensi langsung yang dirancang dalam rangka melakukan perubahan secara terencana pada tingkat organisasi dan komunitas. Intervensi memiliki tiga model pendekatan. Menurut Roothman (1995) dalam Isbandi (2008) model pendekatan tersebut adalah *Locality Development*, *Social Action* dan *Social Planning*.

1) *Locality Development* merupakan model intervensi yang memandang bahwa perubahan atau pengembangan dalam masyarakat dapat dilakukan sangat baik

secara optimal melalui suatu partisipasi aktif dari masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut.

- 2) *Social Action* merupakan model intervensi yang digunakan apabila ada pihak-pihak tertentu yang menindas hak masyarakat sehingga perlu dibantu.
- 3) *Social Planning* merupakan model intervensi yang berkaitan dengan kebijakan dan pelayanan yang ada di masyarakat dengan menekankan pada perencanaan sosial. Model ini meyakini bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan lingkungan yang kompleks memerlukan seorang perencana dalam melakukan proses perubahan.

## 2. Strategi dan Teknik

Strategi dan taktik dalam intervensi komunitas menurut Netting dalam Suharto (2006: 23) dibagi menjadi tiga yaitu:

### 1) Kerjasama (*Collaboration*)

*Collaboration* yaitu strategi pengembangan masyarakat yang dilakukan jika kelompok sasaran/komunitas sudah memahami apa yang akan dan harus dilakukan. Selain itu, komunitas sasaran sudah memiliki kehendak atau kesepakatan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Taktik yang digunakan yaitu implementasi dan *capacity building*. Implementasi yaitu ada kerjasama yang erat, dengan demikian rencana perubahan tinggal diimplementasikan. Sedangkan *capacity building* yaitu pengembangan kemampuan, taktik ini terdiri dari dua taktik lagi yaitu perluasan partisipasi dan pemberdayaan kelompok-kelompok lemah.

- 2) *Kampanye Sosial (Social Campaign)* Kampanye sosial adalah upaya untuk mempengaruhi anggota sistem sasaran agar sistem tersebut menyadari bahwa perubahan memang benar-benar dibutuhkan, dengan demikian sumber yang dibutuhkan dapat dialokasikan. Taktik yang digunakan yaitu pendidikan atau penyuluhan, persuasi, dan pemanfaatan media massa.

Pendidikan atau penyuluhan adalah taktik yang digunakan untuk tujuan memberikan pemahaman kepada kelompok sasaran agar mereka mampu menerima apa yang akan dilakukan dan terlibat secara aktif. Persuasi adalah taktik untuk membujuk atau memberikan gambaran bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat. Pemanfaatan media massa yaitu taktik untuk membujuk atau mengubah persepsi kelompok sasaran dengan memanfaatkan media massa yang ada atau media yang mudah diakses oleh kelompok sasaran.

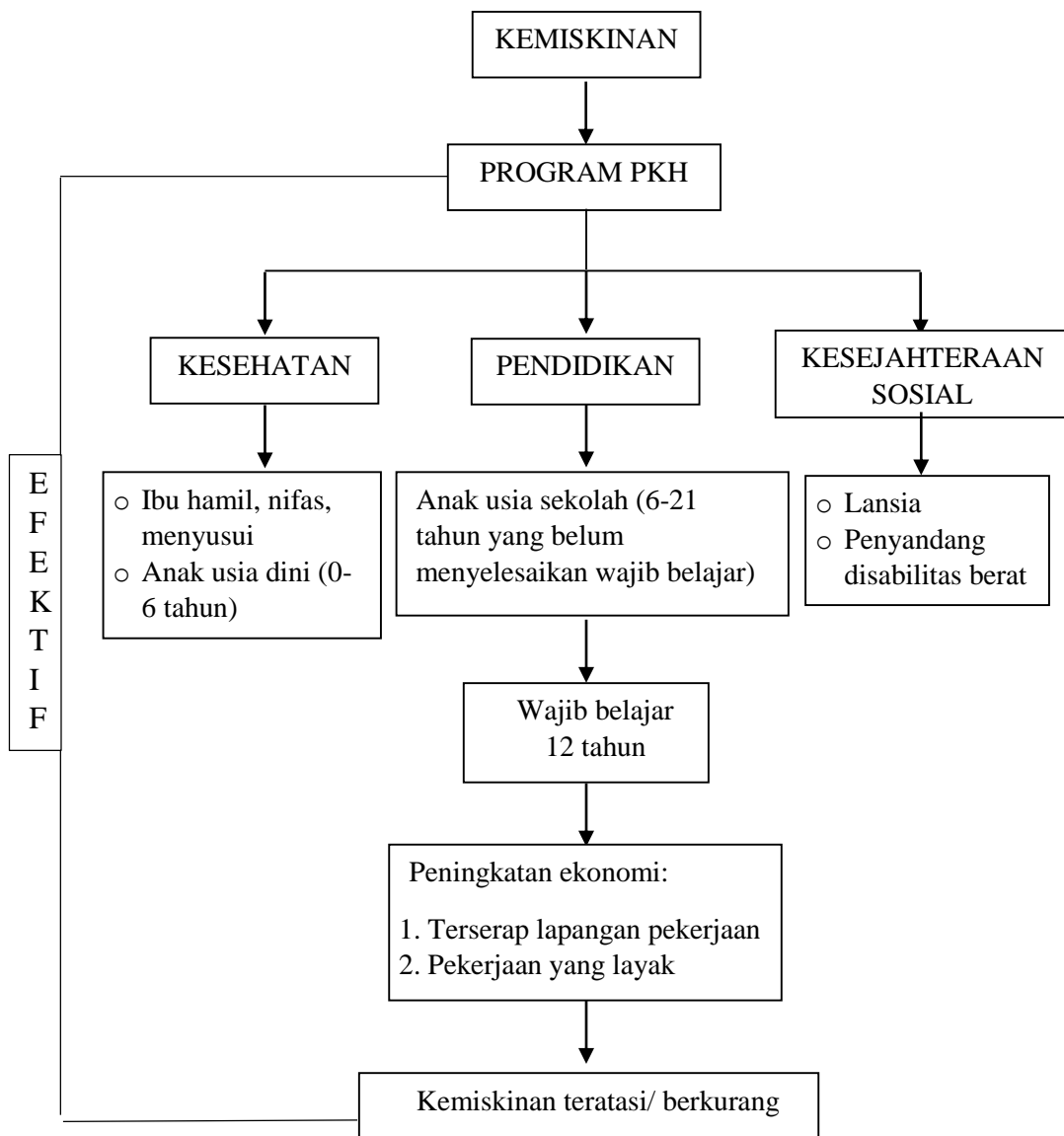
- 3) *Kontes (Contest)*

Kontes adalah strategi yang dapat dilakukan jika kelompok sasaran mengalami permasalahan yang lebih banyak disebabkan oleh struktur kekuasaan yang menindas, tidak adil, dan merugikan kelompok terbesar dalam masyarakat. Taktik yang digunakan yaitu advokasi, tawar menawar dan negosiasi.

Advokasi adalah taktik yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk memperjuangkan kepentingan kelompok sasaran dengan cara menawarkan suatu persyaratan tertentu kepada pihak lain (kelompok dominan, pemerintah

daerah, legislatif, atau kelompok lain yang menindas) sebagai pengganti kerugian yang dialami atas dilaksanakannya suatu program tertentu.

## 2.6 Kerangka Berpikir



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Hasil Penelitian 2023

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang paling disoroti diseluruh dunia terutama di negara berkembang. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di

mana ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pendapatan yang rendah ini juga berdampak kepada berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan anak putus sekolah.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan salah satunya dengan program keluarga harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial untuk keluarga miskin. Tujuan utama PKH adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. Kriteria penerima manfaat PKH terdiri dari komponen kesehatan ditujukan kepada ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun yang belum bersekolah). Komponen kesejahteraan sosial ditujukan kepada lansia dan penyandang disabilitas. Komponen pendidikan ditujukan kepada anak dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar.

Komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial saling berkaitan satu sama lain terhadap penanggulangan kemiskinan, akan tetapi pada penelitian ini lebih terfokus pada pendidikan. Dengan adanya PKH komponen pendidikan dapat mendukung program pemerintah lain yaitu wajib belajar 12 tahun. Pada dasarnya wajib belajar memang sudah 12 tahun akan tetapi di Indonesia khususnya di Desa Ciburial masih ada anak yang putus sekolah. Dengan pendidikan yang baik di usia produktif dapat meningkatkan ekonomi keluarga seperti terserap lapangan

pekerjaan, memiliki pekerjaan yang layak dan lain sebagainya sehingga dengan kondisi ini diharapkan kemiskinan teratasi atau berkurang.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Keberlanjutan Pendidikan di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung” untuk melihat program PKH sudah efektif atau tidak peneliti melakukan penelitian lapangan terkait efektivitas PKH di desa Ciburial.